

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PURBALINGGA
TAHUN 2022**



**Alamat: Jl. Letkol Isdiman No.17A PURBALINGGA 53313
Telp. (0281) 8902091**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga dalam mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran yang telah berjalan dan perjanjian kinerja untuk tahun yang akan berjalan. Proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2022 untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun berikutnya / tahun yang akan datang, melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah , khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan/ gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja instansi pada masa yang akan datang.

Purbalingga, Januari 2023

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM

Pembina Utama Muda
NIP.19650519 198803 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Landasan Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP	9
D. Gambaran Umum Dinkominfo	9
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinkominfo.....	10
2. Susunan Kepegawaian	12
3. Sarana dan Prasarana	13
4. Kondisi Ekonomi	19
BAB II. Perencanaan Kerja	
A. Rencana Strategis	15
Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan.....	15-21
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinkominfo	21-22
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	23-24
BAB III. Akuntabilitas Keuangan Dinkominfo	25
A. Capaian Kinerja Dinkominfo	25
A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	25-42
A.2. Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran	43
A.3. Tingkat Keberhasilan	43
A.4. Tingkat Kegagalan	44
A.5. Hambatan	45-46
A.6. Upaya Mengatasi Hambatan	47
B. Realisasi Keuangan	48
B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinkominfo	47
B.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2022	47-48
BAB IV. PENUTUP	59
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan	59
B. Permasalahan Yang dihadapi	60
C. Upaya Mengatasi permasalahan.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi/ Kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri, hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih *accountable dan up to date* hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, realistis dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/ MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun Anggaran 2022.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjiP

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinkominfo 2021 – 2026
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun yaitu anggaran Tahun 2022.

D. Gambaran Umum Dinkominfo

1. Tugas dan Fungsi Dinkominfo :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, pada Bab. II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam Bab III pasal 4 disebutkan tugas pokok Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi :

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 2. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Sub Urusan Statistik Sektorale yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga juga membantu

Bupati dalam melaksanakan *tugas pembantuan* yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut diupayakan secara optimal melalui peningkatan kinerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026

2. Susunan Kepegawaian

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga , terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat , membawahi :
 1. Subbagian Program , Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Diseminasi Informasi
 - 2. Seksi Informasi Komunikasi Publik ;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK ;
 - 2. Seksi Tata Kelola *e-Government*;
- e. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi;
 - 1. Seksi Persandian;
 - 2. Seksi Statistik ;
 - 3. Seksi Telekomunikasi

1.1. Kondisi kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki ketrampilan dan kemampuan teknis di bidang teknologi Informasi.

Adapun jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga sampai dengan Desember 2021 terinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai

No	PNS	PTT SK Bupati	PTT SK Kadin	Jumlah
1.	41 org	0 orang	25 orang	66 orang

b. PNS Berdasarkan Pendidikan

No	S2	S1	D3/D4	D2	SLTA	SLTP	SD	Jmlh
1.	4 org	27 org	5/1 org	- org	4 org	- org	- org	41 org

c. PNS Berdasarkan Golongan

No	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jmlh
1.	5 org	30 org	6 org	0 org	41 org

d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
1.	27 org	14 org	41org

e. Pembagian Pesonil

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT/ THL)
1	KEPALA DINAS	1	
2	SEKRETARIAT	9	4
3	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	8	2
4	BIDANG IKP	10	13
5	BIDANG INFORMATIKA	13	7
JUMLAH		41 org	25 org

3. Sarana dan Prasarana :

a. **Prasarana Infrastruktur Gedung** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- 1) Gedung Kantor Dinas
- 2) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
- 3) Gedung Santel

b. **Daftar Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga :**

- 1) Tanah : Rp. **619.224.000,-**
- 2) Peralatan dan mesin : Rp. **7.053.239.018,-**
- 3) Gedung dan Bangunan : Rp. **2.172.827.100,-**
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. **89.625.670,-**

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo senilai **Rp. 9.937.415.788,- (Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** dengan akumulasi penyusutan **Rp. 6.294.374.056.02.,** dan Ekstrakomtabel **Rp. 26.160.790,-**

4.Kondisi Ekonomi

Pelayanan Jaringan telepon di Kabupaten Purbalingga sebagian sudah terlayani termasuk didalamnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas didalam ilayah, melalui penguatan konektivitas guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kondisi ekonomi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband, proporsi individu yang memiliki telepon genggam, proporsi individu yang menggunakan internet, tingkat penetrasi pita lebar di perkotaan dan pedesaan dan juga presentase Kabupaten 3T(Terluar, Tertinggal, Terisolir) yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Adapun fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

4.1 Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman– 96.3 FM
- b.Jaringan Internet pada OPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	NAMA OPD	TIPE	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
2.	SEKRETARIAT DPRD	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2020
3.	INSPEKTORAT	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA

	KABUPATEN		NOMOR 12 TAHUN 2016
4.	BAPPELITBANGDA	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
5.	BAKEUDA	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
6.	BKPPD	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2020
7.	KESBANGPOL	INTENSITAS BESAR	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2020
8.	DINDIKBUD	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
9.	DINSOSDALDUKKKB3A	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
10.	DINPERTAN	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
11.	SATPOL PP	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
12.	DINKES	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
13.	DINNAKER	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
14.	DINPENDUKCAPIL	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
15.	DINPERMASDES	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
16.	DPU-PR	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
17.	DINHUB	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016

18.	DLH	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
19.	DINKOMINFO	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
20.	DINPORAPAR	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
21.	DINPERINDAG	A	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
22.	DINKOPUKM	C	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
23.	DPMPSTSP	B	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2016
24.	KELURAHAN PURBALINGGA LOR	C	PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 2008

b. Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website : *purbalinggakab.go.id* dan mempunyai 28 sub domain di masing-masing OPD, yaitu :

b. DAFTAR WEBSITE/APLIKASI	Backup	Status
purbalinggakab.go.id	15/09/2022	migrasi PDN
dinkopukm.purbalinggakab.go.id	15/09/2022	migrasi PDN
dpupr.purbalinggakab.go.id	15/09/2022	migrasi PDN
dpmpstsp.purbalinggakab.go.id	15/09/2022	migrasi PDN
inspektorat.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dlh.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dkpp.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
bkppd.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
bakeuda.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
bappelitbangda.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinkominfo.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinkes.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinsosdaldukkb3a.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN

bpbd.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinarspus.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinporapar.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinrumkim.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dindikbud.purbalinggakab.go.id	28/12/2022	migrasi PDN
dinhub.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinnaker.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinperindag.purbalinggakab.go.id	16/09/2022	migrasi PDN
dinpermasdes.purbalinggakab.go.id	19/09/2022	migrasi PDN
dinpertan.purbalinggakab.go.id	19/09/2022	migrasi PDN
gemasoedirman.purbalinggakab.go.id	19/09/2022	migrasi PDN
wabup.purbalinggakab.go.id	19/09/2022	migrasi PDN
kesbangpol.purbalinggakab.go.id	20/09/2022	migrasi PDN
pkk.purbalinggakab.go.id	20/09/2022	migrasi PDN
sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id	20/09/2022	migrasi PDN
satpolpp.purbalinggakab.go.id	20/09/2022	migrasi PDN
rspantinugroho.purbalinggakab.go.id	21/09/2022	migrasi PDN
dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id	21/09/2022	migrasi PDN
rsud.purbalinggakab.go.id	21/09/2022	migrasi PDN

Sub Domain di masing- masing Kecamatan yaitu :

DAFTAR WEBSITE/APLIKASI	Backup	Status
kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatanbojongsari.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatanbukateja.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankalimahan.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankaranganyar.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankarangjambu.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN
kecamatankarangmoncol.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankarangreja.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankejobong.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankemangkon.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatanmrebet.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatanpadamara.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
kecamatanpurbalingga.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN

kecamatanrembang.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN
portalkecamatan.purbalinggakab.go.id	14/09/2022	migrasi PDN

Sub Domain Kelurahan yaitu :

DAFTAR WEBSITE/APLIKASI	Backup	Status
kelurahanbancar.purbalinggakab.go.id	06/10/2022	migrasi PDN
kelurahanbojong.purbalinggakab.go.id	06/10/2022	migrasi PDN
kelurahangadul.purbalinggakab.go.id	06/10/2022	migrasi PDN
kelurahangalon.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahangalor.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahangatan.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahankalikabong.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahankandangampang.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahankarangmanyar.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahankarangsantul.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahankedungmenjangan.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahankembarankulon.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahanmewek.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahanpenambongan.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN
kelurahanwirasana.purbalinggakab.go.id	09/01/2023	migrasi PDN

Sub Domain Desa yaitu :

DAFTAR WEBSITE/APLIKASI	Backup	Status
tlahabkidul.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
danasari.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
sirandu.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
sanguwatang.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
selaganggeng.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
binangun.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
banjarsari.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
campakoah.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
karangmalang.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
karangreja.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
karangtalun.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
onje.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
serayularangan.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
mangunegara.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
gandasuli.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
karangturi.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
lambur.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
limbasari.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
majapura.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
sangkanayu.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN

siwarak.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
tlahablor.desa.id	25/07/2022	migrasi PDN
langgar.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
larangan.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
sokanegara.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
tetel.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
gumiwang.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
nangkasawit.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
nangkod.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
brecek.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
kalikajar.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
tumanggal.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
kedarpan.desa.id	28/06/2022	migrasi PDN
bedagas.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
tegalpingen.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
bandingan-purbalingga.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
kembaranwetan.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
penolih.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
tejasari.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
cilapar.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
penaruban.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
kaligondang.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
arenan.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
sinduraja.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
semporlor.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
selakambang.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
lamongan-purbalingga.desa.id	30/06/2022	migrasi PDN
karanggedang-purbalingga.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
bokol.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
karangcengis.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
kedungjati.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
muntang.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
pelumutan.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
toyareka.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
bojong.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
sumilir.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
tangkisan.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
karangkemiri.desa.id	12/07/2022	migrasi PDN
karangbanjar.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
sokawera-purbalingga.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
kalitinggar.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
blater.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
karangjambe.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
karanggambas.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
candinata.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
galuh.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
gembong.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
kajongan.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
munjul.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
karanglewas.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
brobot.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN

LKJIP DINKOMINFO 2022

candiwulan.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
cendana.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
dawuhan-purbalingga.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
kalimanahwetan.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
karangcegak.desa.id	14/07/2022	migrasi PDN
karangjengkol.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
limbangan.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
metenggeng.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
karangklesem.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
karangpule.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
bojongsari-purbalingga.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
pekalongan-purbalingga.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
karangpetir.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
manduraga.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
sidakangen.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
rabak.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
jompo.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
klapasawit.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
sumingkir.desa.id	16/07/2022	migrasi PDN
bumisari-purbalingga.desa.id	23/12/2022	migrasi PDN
patemon.desa.id	23/12/2022	migrasi PDN
purbayasa-purbalingga.desa.id	23/12/2022	migrasi PDN
selabaya.desa.id	21/12/2022	migrasi PDN
ponjen.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
brakas.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
bodaskarangjati.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
panusupan.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
karangbawang-purbalingga.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
karanggedang.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
karangsari-karangmoncol.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
gunungwuled.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
losari-purbalingga.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
maribaya.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
kaliori-purbalingga.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
bungkanel.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
grantung.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
bantarbarang.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
makam.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
wanogarakulon.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
krangean.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
langkap.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
taiug.desa.id	06/12/2022	migrasi PDN
pepedan-purbalingga.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
mergasana.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
kertanegara-purbalingga.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
kasih.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
condong.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
adiarsa.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
tanalum.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
sumampir.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN
wanogarawetan.desa.id	19/07/2022	migrasi PDN

Sub Domain Puskesmas yaitu :

DAFTAR WEBSITE/APLIKASI	Backup	Status	Versi WP
puskesmasbobotsari.purbalinggakab.go.id	27/10/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmasbojongsari.purbalinggakab.go.id	02/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmasbukateja.purbalinggakab.go.id	02/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskaligondang.purbalinggakab.go.id	03/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id	03/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskarangjambu.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskejobong.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskemangkon.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskutawis.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmasmrebet.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaspadamara.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaspengadegan.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmasrembang.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmasbojong.purbalinggakab.go.id	07/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskalikajar.purbalinggakab.go.id	15/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskarangtengah.purbalinggakab.go.id	15/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id	15/11/2022	migrasi PDN	6,1
puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id	30/11/2022	migrasi PDN	6.1.1
puskesmasserayularangan.purbalinggakab.go.id	30/11/2022	migrasi PDN	6.1.1
puskesmaskaranganyar.purbalinggakab.go.id	30/11/2022	migrasi PDN	6.1.1
puskesmaskarangmoncol.purbalinggakab.go.id	30/11/2022	migrasi PDN	6.1.1

a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sesuai dengan Perpres. No.4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka di Kabupaten Purbalingga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di lakukan melalui LPSE, yaitu

- 1). Pengadaan barang pemerintah dengan anggaran lebih dari
Rp. 200.000.000,-
- 2). Pengadaan Jasa Konsultan dengan anggaran lebih dari
Rp. 50.000.000,-

Adapun mulai Tahun 2018 LPSE sudah bukan Tupoksi Dinkominfo lagi, tetapi merupakan tupoksi Setda berdasarkan

permendagri **Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.**

b. Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/ 273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID , PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan opsional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga **Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai **Sekretariat pada PPID Utama** .

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl. Letkol Isdiman No 17 A Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke **ppid@purbalinggakab.go.id** dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat **ppid.purbalinggakab.go.id**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026 .

Untuk mewujudkan Renstra tersebut ditetapkan Visi dan Misi yang rasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yaitu :

A.1. Visi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
“ Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia ”

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat

dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

A.2. M I S I :

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni **Misi 1 : *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.***

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : ***Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.***

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah : ***Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.***

Dalam keterkaitan mewujudkan misi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2) Meningkatkan ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat
- 3) Meningkatkan keamanan informasi

A.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Good Governance melalui pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik “

Sedangkan indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Daerah
3. Tingkat Keamanan Informasi Daerah

A.4. Kebijakan

1) Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk :

- 1.1.1. Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
- 1.1.2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka *e-Government* di Kabupaten Purbalingga
- 1.1.3. Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK.)
- 1.1.4. Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

A.5. Prioritas Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 5 (lima) Program sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota;
- B. Program Informasi dan Komunikasi Publik;

- C. Program Aplikasi Informatika;
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Program-program tersebut dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 30 Sub kegiatan yang terdiri dari :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 2.Penyediaan Bahan logistik kantor
 - 3.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
 1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 2. Pelayanan Informasi Publik
 3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
 1. Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
 1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor kegiatan terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
 1. Membangun Metadata Statistik Sektor

2. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi kegiatan terdiri dari :

- a. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Kab/ kota dengan sub kegiatan :
 1. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dalam rencana kinerja Tahun 2023 Dinkominfo, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINKOMINFO 2021 – 2026

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good governance* melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Point	3,23	3,04	3,04	3,05	3,05	3,06
2										
3										
4		Meningkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks keterbukaan informasi publik	Point	95	95	95,5	96	96	97,50

LKJIP DINKOMINFO 2022

5		Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Perse n	25	30	40	45	50	50
6		Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	NA	32,2	32,2	35	35	35
7		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	Nilai	68	68,02	68,62	68,62	69	69,82

Tabel4.

**Tujuan,Sasaran,Strategi,Kebijakan Jangka Menengah Dinkominfo
Tahun 2021-2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip <i>Good Governance</i> melalui pengembangan sistim pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1. Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraa n pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan system informasi manajemen di tiap SKPD	1.Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi publik serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK
2		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan Data pada portal Satu data Daerah	2. Mengoptimalka n data yang diuploed pada portal Satu data daerah dan data yang update dan sesuai standart	2.Mengoptimalkan data yang diuploed pada Satu data Daerah dan data yang update, sesuai standart
3		Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3. Peningkatan Pengamanan Informasi Daerah	3.Mengoptimalkan Pengamanan Informasi Daerah
4		Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	4. Peningkatan kualitas kelembagaan Dinkominfo	4.Mengoptimalkan kualitas kelembagaan Dinkominfo

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Mendasarkan pada RENSTRA 2021- 2026 setelah ditetapkan APBD Tahun 2022 maka dibuat Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara

Kepala Dinkominfo dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan		
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip good governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,04
		Presentase ketersediaan Data pada portal Satu Data Daerah	30
		Tingkat Keamanan Informasi Daerah	60
	Sasaran		
1	Meningkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks keterbukaan informasi publik	95,5
2	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Presentase ketersediaan data pada portal satu data Daerah	30
3	Meningkatnya keamanan informasi	Presentase pengamanan informasi daerah	100
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	68,02

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINKOMINFO

A. CAPAIAN KINERJA DINKOMINFO

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dan juga hambatan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 ada 6 (enam) aspek yang akan dibahas, yaitu :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

A.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

A.3.Tingkat keberhasilan

A.4.Tingkat kegagalan

A.5.Hambatan

A.6.Upaya mengatasi hambatan

Untuk memudahkan penjabaran atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% < 100%	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatannya sesuai dengan peruntukannya. Adapun capaian indikator kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga kami rangkum dalam Table berikut ini :

Tabel 5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target 2022	Capaian kinerja tahun 2022	Prosentase (%)	target Masa Akhir Renstra
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Point	3,23	3,04	3,20	105,2 %	3,06
2									
3									
4		Meningkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks keterbukaan informasi publik	Point	83,5	95,5	68,23	71,2%	97,50
5		Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	40	40	94	313%	50
6		Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	NA	32,2		24,9%	35%
7		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	Nilai	68	68,62	71,16	68,62	69,82

LKJIP DINKOMINFO 2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dari awal tahun sampai akhir tahun 2022 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinkominfo untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatkan Keamanan Informasi
3. Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data daerah yang bisa diakses oleh masyarakat
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 (Tiga) indikator tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan yaitu :

1. Indeks SPBE

2. Presentase Data pada portal Satu data Daerah

3. Tingkat Keamanan Informasi Daerah

Dan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan, kegagalan dan juga hambatan ditetapkan 4 (empat) sasaran.

Adapun ke 4 (empat) sasaran tersebut adalah :

1. Sasaran meningkatkan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik :

Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu :

a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik .

Target PPID yang teregulasi di tahun 2019 adalah sebesar **39,5 %** , dan target ini tercapai dengan realisasi PPID Pembantu yang terbentuk dan teregulasi sejumlah **29 OPD , 10 PPID desa**, pada tahun 2021 PPID yang teregulasi sejumlah 29 OPD dan 12 PPID

desa, hanya saja dari PPID yang teregulasi ada beberapa yang tidak aktif, hal ini dikarenakan :

- a. Kurang responsif dan Koordinasinya admin KIP/ PPID dalam penyampaian informasi dari Tim Komunikasi Informasi (KIP) Provinsi
- b. Tidak adanya anggaran pendampingan PPID
- c. Kurang koordinasinya antara PPID Utama dan PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga dengan kedudukannya sebagai **Sekretaris di PPID Utama** menyikapi adanya hambatan yang ada dengan :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Tim KIP Provinsi dan adanya admin cadangan (tidak hanya satu orang) KIP/ PPID
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait (Bappelitbangda , Bakeuda) adanya anggaran pendampingan PPID
 - c. Mengadakan koordinasi dengan rapat- rapat koordinasi dengan PPID Pembantu.

Dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian keterbukaan Informasi Publik Pemkab/ Pemkot Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemeringkatan keterbukaan Badan Publik Tahun 2019 Dinas Komunikasi Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke **11 (sebelas)** dari 35 Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah nilai **82,56 dengan kategori Menuju Informatif**, apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga hanya mendapatkan nilai **70,2 dengan kategori Cukup Informatif** peringkat ke **14 (empat belas)** dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, berarti Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan peringkat dan nilai dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019, sebagai pembanding kita bisa lihat nilai KIP Kabupaten/ Kota pada table perolehan nilai KIP tingkat Provinsi JawaTengah Tahun 2019 berikut ini :

No	Nama Kabupaten	Jumlah Nilai	Kategori
1	Kab. Purbalingga	82,56	Menuju Informatif
2	Kab. Banjarnegara	11,02	Tidak Informatif
3	Kab. Cilacap	74,85	Cukup Informatif
4	Kab. Banyumas	88,62	Menuju Informatif

Di Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Nilai **93,5 %** masih dengan predikat “ **Menuju Informatif** “ sedangkan di Tahun 2021 Dinkominfo Kab. Purbalingga mendapatkan nilai **83,96** masih dalam kategori “ **Menuju Informatif** “

Tabel 3.17

Nilai Kabupaten/ Kota Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2021

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	Kota Surakarta	96,00	informatif
2	Kab. Demak	95,71	informatif
3	Kab. Kebumen	95,09	informatif
4	Kab. Wonogiri	94,46	informatif
5	Kab. Karanganyar	94,15	informatif
6	Kab. Batang	93,21	informatif
7	Kab. Banyumas	93,21	informatif
8	Kota Semarang	91,56	informatif
9	Kab. Temanggung	89,56	Menuju Informatif
10	Kab. Klaten	88,96	Menuju Informatif
11	Kab. Kudus	88,44	Menuju Informatif
12	Kab. Wonosobo	84,40	Menuju Informatif
13	Kab. Purbalingga	83,96	Menuju Informatif
14	Kab. Kendal	82,96	Menuju Informatif
15	Kab. Cilacap	80,85	Menuju Informatif

Sumber : Komisi Informasi Publik Tahun 2021

Nilai Keterbukaan informasi publik tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **9,54%** bila dibandingkan Nilai KIP di tahun 2020. Penurunan nilai ini disebabkan :

1. Kurangnya supporting dari PPID Pembantu yang di Tahun sekarang penilaiannya inklude di dalamnya tidak hanya PPID Utama.
2. Penilaian PPID Pembantu difokuskan pada lima PPID yang menangani masalah pencegahan Covid -19 tiga PPID Pembantu diantaranya sudah ditunjuk oleh Tim KIP Provinsi Jawa Tengah yaitu : Dinas Kesehatan, DinsosdaldukKBP3A dan BPBD, sedang dua PPID Pembantu ditunjuk oleh PPID Utama yaitu, Dinas Perhubungan dan Satpol PP

Penilaian evaluasi Badan Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- a. Penilaian monitoring dan evaluasi terhadap Website dan Medsos Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab (PPID Utama)
- b. Penilaian *selt assesment quisioner* (SAQ) merupakan gabungan nilai SAQ PPID Pembantu dan PPID Utama
- c. Penilaian hasil visitasi dan Verifikasi Keterbukaan Informasi Publik
- d. Penilaian hasil uji publik oleh Tim Penilai, dihadiri secara pribadi oleh Bupati Purbalingga sebagai penalis paparan uji publik.

Di Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik dari Komisi Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan nilai **68,23%** meliputi :

- a. Penilaian monitoring dan evaluasi terhadap Website dan Medsos Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab (PPID Utama)
- b. *selt assesment quisioner* (SAQ) merupakan gabungan nilai SAQ PPID Pembantu dan PPID Utama
- c. Penilaian hasil visitasi dan Verifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya yaitu:

- a. melakukan pembinaan dan evaluasi internal di PPID Utama maupun di PPID Pembantu sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun kegiatan dimaksud antara lain :
 - melakukan rapat berkala internal PPID Utama terkait dengan pengelolaan data, pelayanan informasi maupun pengaduan dari pemohon informasi;
 - melakukan pertemuan secara berkala dengan Ketua PPID Pembantu dan Admin OPD dalam rangka meningkatkan berkoordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik, meliputi pelayanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
 - Koordinasi secara intens dengan Tim Komisi Informasi Publik Provinsi
- b. Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap PPID Pembantu.

- kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung ke OPD dalam rangka monitoring regulasi dan pembinaan kelembagaan PPID Pembantu maupun ketersediaan Dokumen Informasi yang menjadi kewajiban badan publik;
- memantau konten website masing-masing PPID Pembantu, agar konten websitenya selalu *ter-update* (diisi dengan data baru) setiap saat, sehingga apabila ada pemohon informasi dapat segera terlayani dengan baik.

Adapun hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. masih kurangnya komitmen dari Pimpinan OPD untuk turun serta berpartisipasi aktif sebagai PPID Pembantu dan masih adanya anggapan bahwa keterbukaan informasi publik bukanlah permasalahan dan tanggungjawab bersama OPD, namun hal itu menjadi tanggungjawab dan urusan OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
- b. kurangnya SDM yang menangani secara khusus dalam pengelolaan konten *website* / Admin, sehingga *updating* data berupa informasi tidak menjadi tugas utama melainkan hanya merupakan tugas tambahan;
- c. Kurangnya supporting dari PPID Pembantu kepada PPID Utama

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas, maka diperlukan solusi maupun terobosan diantaranya yaitu:

- a. membuat surat edaran/himbauan Bupati ataupun Sekda, melaksanakan Rapat Koordinasi yang dipimpin Bupati atau Sekda dalam rangka mendorong komitmen serta dukungan dan kerjasama para Pimpinan OPD untuk berpartisipasi dalam pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kabupaten yaitu Informatif.
- b. menginisiasi pelaksanaan lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD, dengan memberikan *reward* bagi OPD yang support dan respon akan Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Menyupport PPID Pembantu dalam pengelolaannya agar lebih mendukung PPID Utama

Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga terkait Keterbukaan Informasi Publik di Tahun 2019 dengan adanya aplikasi sebagai berikut :

1. <http://ppid.purbalinggakab.go.id/>
2. <https://data.purbalinggakab.go.id/>
3. <https://portalkecamatan.purbalinggakab.go.id/>
4. <https://jdih.purbalinggakab.go.id/>
5. <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/>
6. <https://monitoringwebsite.purbalinggakab.go.id/>
7. 35 website OPD
8. 18 website kecamatan
9. 15 website kelurahan
10. 133 website desa

Inovasi ini dibarengi dengan rencana aksi di tahun 2019 yaitu

- a. Penguatan PPID Utama dan PPID Pembantu
- b. Mendorong Publikasi Informasi melalui Website masing- masing OPD
- c. Membuat website bagi seluruh kecamatan dan kelurahan
- d. Persentase tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat dengan target 100%**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam mencapai capaian kinerja tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat agar bisa tersampaikan dan terinventarisir dengan baik yaitu dengan adanya aplikasi “ **Matur Bupati** “ dengan alamat <https://maturbup.purbalinggakab.go.id/> sesuai dengan *Perbup Nomor 90 tahun 2018 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi matur Bupati dengan SOP (standar operating procedures) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi maturbup.purbalinggakab.go.id/*

Jumlah pengaduan dan aspirasi masyarakat yang masuk :

No	Uraian	jumlah	Realiasasi
1	Jumlah laporan yang masuk	309 laporan	
2	Laporan selesai ditanggapi		265 laporan
3	Laporan didisposisi		41 laporan
4	Laporan dalam proses		3 laporan

Dari hasil Jumlah pengaduan dan aspirasi dari masyarakat yang masuk bisa ditanggapi dan ditangani dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai target di Tahun 2019 ini dengan hasil **100%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-1**, dari 2 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari ke-2 indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-1 adalah sebesar 100 %) .

Inovasi kebijakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat :

- Tahap pengembangan matur bupati versi android
- email: maturbup@purbalinggakab.go.id
- proses integrasi dengan layanan pengaduan provinsi: <https://laporgub.jatengprov.go.id/> dan sistim pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional (SP4N)
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (lapor) <https://www.lapor.go.id/>

2. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyajian data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah bekerja sama dengan Kantor Statistik/ (**BPS**) Kabupaten Purbalingga yang berintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah / OPD menerbitkan buku Purbalingga

Dalam Angka (**PDA**) dan Kecamatan Dalam Angka (**KDA**) Adapun di tahun 2019 target Purbalingga Dalam Angka jumlah 180 eks, Kecamatan Dalam Angka (**KDA**) jumlah 100 eks peruntukan bagi OPD dan Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di Tahun 2019 capaian kinerja sudah sesuai target 100% yaitu dengan jumlah pencetakan buku **PDA 180 eks, KDA 100 eks** dan sebagai transparansi data di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga ada Satu Data Purbalingga yang bisa diunduh di <https://data.purbalinggakab.go.id/> Sebagai pembandingan di satu data purbalingga di tahun 2018 ada **1267 data** yang diupload OPD, di tahun 2019 ada **2345 data** sedangkan di Tahun 2022 data yang sudah diupload berjumlah **4755 data** target **5000 data** dari **51 OPD** yang mengupload di Satu Data Purbalingga

Tabel 3.18

Jumlah Data yang diupload di Portal Satu Data Purbalingga Tahun 2022

	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Ket
Jumlah Data yang diupload OPD	1267 Target 1200	2345 Target 2000	2500 Target 2500	2912 Target 3000	4755 Target 5000	
Persentase	105%	117%	100%	97%	94%	

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun sampai dengan Tahun 2022 semakin baik OPD dalam penguploadan data pada portal Satu Data Purbalingga

Hambatan dalam meningkatnya ketersediaan Data Dasar dan Data Sektoral Daerah adalah :

1. admin OPD satu data purbalingga yang tidak tetap karena mutasi pegawai.
2. OPD yang tidak aktif / pasif
3. Data OPD yang tidak rutin untuk diperbarui.

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi hambatan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar dan data sektoral daerah adalah;

1. penunjukan admin cadangan di OPD
2. monitoring keaktifan OPD dalam menguplode data dan pembaharuan data
3. Jemput bola untuk penguploadan Data OPD

3. Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target capaian kinerja sistim pesandian daerah yaitu dengan mengolah dan mendistribusikan surat - surat yang masuk dan keluar melalui santel berdasarkan sifat surat.

Adapun jumlah surat yang diolah dan didistribusikan berdasarkan sifat surat di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Asal Surat	Jumlah	Sifat Surat		Ket
			penting	Sngt penting	
1	Pemerintah Pusat	657 eks	657 eks	-	Didistribusikan ke penerima
2	Provinsi	459 eks	459 eks	-	Didistribusikan ke penerima
3	Kab/Kota lain	10 eks	10 eks	-	Didistribusikan ke penerima

dari hasil tabel tersebut diatas, capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga guna meningkatkan kinerja system

persandian daerah tercapai sesuai target **100%**, yaitu dengan jumlah surat yang masuk dan keluar , diolah dan didistribusikan kepada penerima berdasarkan sifat surat yang terealisasi dengan aman, tertib dan lancar.

Untuk Tingkat Keamanan Informasi (**Indeks KAMI**) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di Tahun 2022 sudah memasuki tahapan Sosialisasi dan pembuatan Peraturan Bupati tentang Keamanan Informasi (Indeks KAMI), pelaksanaan assesment dilakukan secara mandiri dengan nilai 32,2

Hambatan yang ada dalam pencapaian Indeks KAMI adalah :

- a. Kurangnya kompetensi SDM/ Tenaga yang ahli tentang Keamanan Informasi
- b. Rendahnya Pengelolaan Manajemen resiko Keamanan Informasi

Solusi yang dilakukan :

- a. Adanya diklat/ Bimtek bagi SDM/ Tenaga ahli yang adanya Keamanan Informasi
- b. Perlu pembentukan Tim penyusunan dokumen manajemen resiko yang lebih komprehensif

4.Sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan kualitas kelembagaannya, terbukti dengan naiknya nilai SAKIP Dinkominfo dari target nilai 68,02 mendapatkan nilai 71,16 sehingga ada kenaikan nilai 3,14.

Hambatan yang ada :

- c. Kurangnya koordinasi tentang capaian kinerja lembaga
- d. Tingkat kepedulian tentang laporan kinerja belum maksimal

Upaya yang dilakukan :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan bidang tentang capaian kinerja lembaga

- b. Meningkatkan dan menumbuhkan kepedulian tentang laporan kinerja

Capaian SPBE Kabupaten Purbalingga

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (**SPBE**) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk mengetahui capaian kemajuan penerapan SPBE baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) pada tahun 2021 melakukan evaluasi dan penilaian SPBE dengan 35 indikator penilaian.

Indikator penilaian SPBE tersebut terdiri dari :

1. Indikator 1 – 17 tentang Kebijakan SPBE
2. Indikator 18 – 24 tentang Tata Kelola SPBE
3. Indikator 25 – 31 tentang Layanan Administrasi Pemerintahan
4. Indikator 32- 35 tentang Layanan Publik.

dengan skala indeks SPBE sebagai berikut :

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 -5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

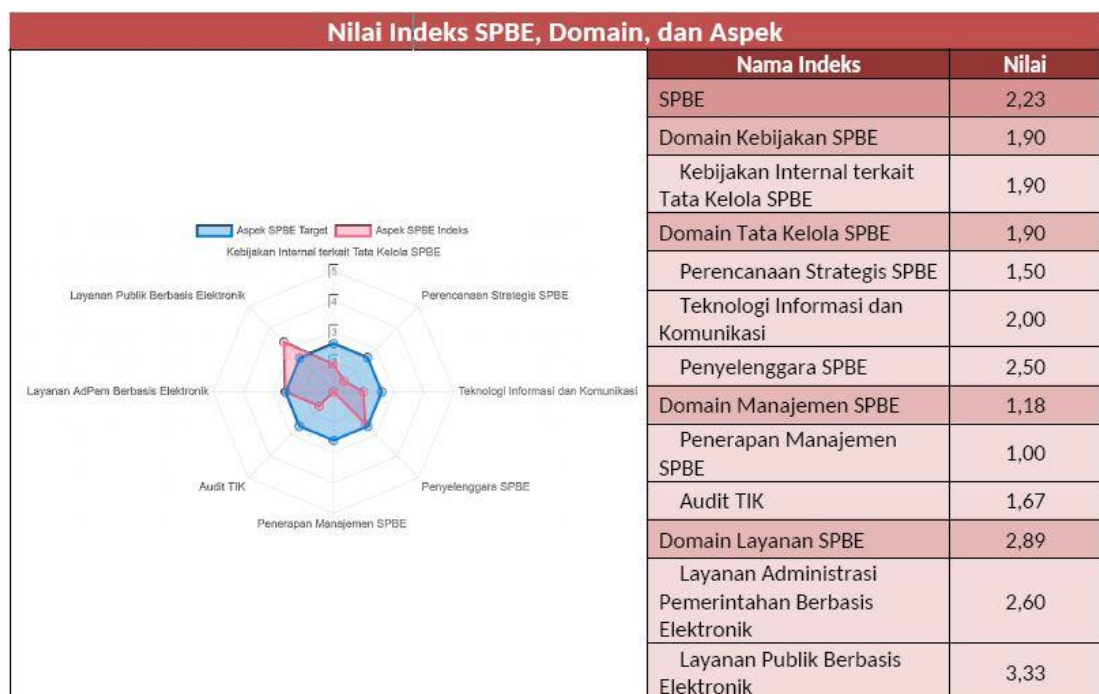
CAPAIAN SPBE TAHUN 2021

1. Indeks SPBE

Berdasarkan download data tentang hasil penilaian SPBE pada aplikasi di Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu instansi yang dievaluasi SPBE di tahun 2021.

Adapun hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2021 sebesar **2,23** dengan predikat cukup. Adapun rincian indeks sebagai berikut :

Gambar 3.9 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



Dalam rangka mengetahui perkembangan indeks SPBE setiap tahunnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga melaksanakan evaluasi SPBE dengan instrumen yang telah disesuaikan dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.59 Tahun 2021 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, hal ini dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai, dengan diterapkannya instrumen baru ini

tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE pada hampir menyeluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021 menjadi **Baseline** kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna peningkatan penerapan SPBE dalam rangka meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan terwujudnya digitalisasi Pemerintah dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam rangka mengembangkan implementasi SPBE antara lain :

1. Menyusun Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas perbup nomor 90 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi maturbup
2. Pada Domain layanan SPBE untuk layanan publik tahun 2020 DINKOMINFO telah melaksanakan kegiatan :
 - a. pembuatan aplikasi untuk layanan izin penelitian online (untuk Bappelitbangda)
<https://siintan.purbalinggakab.go.id/>;
 - b. fasilitasi perizinan online Bidang Kesehatan (untuk DPMPSTSP)
 - c. Layanan informasi Covid 19
<https://corona.purbalinggakab.go.id/>
 - d. Peta Sebaran Covid 19
<https://petatematik.purbalinggakab.go.id/peta/monitoring-corona>
 - e. Layanan Informasi Konvergensi Stunting
<https://cegahstunting.purbalinggakab.go.id/>
 - f. Aplikasi pengecekan data penerima bantuan sosial terdampak Covid 19
<https://cekbansos.purbalinggakab.go.id/>
 - g. Pembuatan web Whistleblowing System
<https://wbs.purbalinggakab.go.id/>

- h. Fasilitasi domain <https://optima.purbalinggakab.go.id/> untuk pelayanan administrasi kependudukan online
- i. Pembuatan aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian (**Syantika**) yang terintegrasi dg aplikasi e-kepegawaian (linkl e-presensi : ***bit.ly/SyantikaApp***)
- j. Pembuatan aplikasi untuk mengetahui kegiatan harian yang dilaksanakan pegawai/ ASN <http://e-kinerja.purbalinggakab.go.id>

Solusi dalam rangka meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu adanya langkah - langkah strategis sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan sosialisasi peta rencana, arsitektur SPBE, keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta inovasi proses bisnis ;
- b. Membangun dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dengan aplikasi SPBE, layanan Pusat Data , Layanan Jaringan Intra dan penggunaan sistem penghubung layanan;
- c. Kematangan Pembangunan Aplikasi, Layanan Data, Penyediaan Jaringan intra, penyediaan sistem penghubung Pemerintah dan penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah ;
- d. Menyusun dan mensosialisasikan penerapan manajemen SPBE, manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE
- e. Melakukan pembangunan dan pengelolaan audit TIK terkait, pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE;
- f. Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data;
- g. Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi , integrasi aplikasi atau integrasi data

Tahun 2022 Capaian nilai SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mencapai nilai 3,20

dengan kenaikan yang begitu pesat dari nilai 2,03 di yaitu dengan pemenuhan segala indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

A.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

1) Sasaran 1, Tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1** dari 4 (empat) indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 97,17%. Hal ini dikarenakan pada indikator tercukupinya administrasi kantor dengan anggaran sebesar Rp. 247.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 226.969.682,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 20.030.318,- pada indikator terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 141.100.000,- bisa terserap sebesar Rp. 139.568.100,- atau 98, 91%, terdapat selisih anggaran Rp. 1.531.900,- selanjutnya pada indikator terlaksananya diklat pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- bisa terserap sebesar Rp. 29.999.050,- atau 100%. Dan realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan untuk sasaran 1, sebesar 96,81%, pencapaian dari sasaran ini masuk dalam kategori **“baik”**

2) Sasaran 2, Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, dari 12 (dua belas) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan masuk dalam kategori **“ baik”**

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah jenis pelayanan publik secara online tahun 2022 adalah 15 OPD dengan 42 aplikasi pelayanan publik yang dibuat oleh Kominfo (1 Portal Purbalingga, 1 Website Purbalingga, 33 sub domain, 133 website desa, 18 website

Kecamatan, 15 website kelurahan, 22 website Puskesmas atau lebih dari 100 % dari target yang di tentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 33 layanan publik (1 website Purbalingga, 28 sub domain, 1 Sistem Surat Elektronik dan 1 LPSE). Realisasi RPJMD 2021 – 2026 cenderung meningkat, realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan RPJMD

A.3. Tingkat Keberhasilan Kinerja Sasaran

Secara Umum pada tahun 2021 Dinkominfo dapat melaksanakan 2(dua) sasaran yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100% atau masuk dalam kategori ***“amat baik”***,

A.4. Tingkat Kegagalan kinerja sasaran

Selain tingkat keberhasilan tersebut, pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak bisa tercapai 100%, namun masuk dalam kategori baik, yaitu pada sasaran:

3) A.4.1. Sasaran 2, *Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-2** dari 12 (dua belas) indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95,66%. Pada kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab ada sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 59.596..436,-ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terelasisasi yaitu release dan pencetakan majalah Derap Perwira untuk Tri Wulan ke IV .karena kurangnya tenaga yang membidangi pada kegiatan tersebut.

A.5. Hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran:

- 1.Belum adanya Perbup tentang Satu Data Purbalingga yang memuat ***satuan data*** yang harus diuploed pada Satu Data Purbalingga;
- 2.masih kurangnya komitmen dari Pimpinan OPD untuk turun serta berpartisipasi aktif sebagai PPID Pembantu dan masih adanya anggapan bahwa keterbukaan informasi publik bukanlah permasalahan dan tanggungjawab bersama OPD,

- namun hal itu menjadi tanggungjawab dan urusan OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
- 3.kurangnya SDM yang menangani secara khusus dalam pengelolaan konten *website* / Admin, sehingga *updating* data berupa informasi tidak menjadi tugas utama melainkan hanya merupakan tugas tambahan;
 - 4.Kurangnya supporting dari PPID Pembantu kepada PPID Utama Beberapa permasalahan/ hambatan yang dihadapi dalam penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga diantaranya :
 - 5.belum memiliki perencanaan strategis SPBE terkait arsitektur SPBE dan inovasi proses bisnis SPBE.
 - 6.Belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat data, Layanan Jaringan Intra dan penggunaan sistem Penghubung Layanan (sudah tersedia, hanya digunakan sebagian OPD)
 - 7.Belum memiliki tata kelola yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE
 - 8.Belum memiliki penerapan Manajemen SPBE terkait penerapan manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan informasi, penerapan manajemen data, penerapan manajemen Asset TIK, penerapan kompetensi sumber daya manusia, penerapan manajemen pengetahuan , penerapan manajemen perubahan dan penerapan manajemen layanan SPBE
 - 9.Belum menjalankan audit TIK terkait, pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi, audit keamanan SPBE.
 - 10.Belum memiliki layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik tentang layanan kepegawaian, pengelolaan barang, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas organisasi, dan kinerja pegawai.
 - 11.Belum memiliki layanan Publik Berbasis Elektronik terkait layanan Data Terbuka

A.6. Upaya mengatasi Hambatan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinkominfo mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Adanya revisi Perbup tentang Satu Data Purbalingga.

2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal di PPID Utama maupun di PPID Pembantu sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun kegiatan dimaksud antara lain :

- melakukan rapat berkala internal PPID Utama terkait dengan pengelolaan data, pelayanan informasi maupun pengaduan dari pemohon informasi;
- melakukan pertemuan secara berkala dengan Ketua PPID Pembantu dan Admin OPD dalam rangka meningkatkan berkoordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik, meliputi pelayanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);

3. melaksanakan monitoring terhadap PPID Pembantu.

- kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung ke OPD dalam rangka monitoring regulasi kelembagaan PPID Pembantu maupun ketersediaan Dokumen Informasi yang menjadi kewajiban badan publik;
- memantau konten website masing-masing PPID Pembantu, agar konten websitenya selalu ter-Update setiap saat, sehingga apabila ada pemohon informasi dapat segera terlayani dengan baik.

Solusi dalam rangka meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu adanya langkah - langkah strategis sebagai berikut :

- e. Penyusunan dan sosialisasi peta rencana, arsitektur SPBE, keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta inovasi proses bisnis ;
- f. Membangun dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dengan aplikasi SPBE, layanan Pusat Data , Layanan Jaringan Intra dan penggunaan sistem penghubung layanan;
- g. Kematangan Pembangunan Aplikasi, Layanan Data, Penyediaan Jaringan intra, penyediaan sistem penghubung Pemerintah dan penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah ;
- h. Menyusun dan mensosialisasikan penerapan manajemen SPBE, manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE
- e. Melakukan pembangunan dan pengelolaan audit TIK terkait, pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE;
- f. Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data;
- g. Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi , integrasi aplikasi atau integrasi data

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di Tahun 2020 dan 2021 memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Adapun perolehan PAD bisa digambarkan :

Table.6

Table Perolehan PAD Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara

No	Uraian	Target	Realisasi	Ket
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2020	Rp.714.630.000,-	Rp.854.561.250,-	Rp.139.931.250,- (selisih lebih PAD)
2	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2021	Rp.850.000.000,-	Rp.686.565.625,-	Rp.163.434.375,- (selisih kurang PAD)
3	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 2022	Rp.950.000.000	Rp.938.000.000,-	Rp.12.000.000,- (selisih kurang PAD)

Dari tabel diatas bahwa di tahun 2020 perolehan PAD retribusi menara melebihi target dengan selisih lebih Rp.139.931.250,- sedangkan PAD Menara Tahun 2022 adanya selisih kurang dari target sebesar Rp. 12.000.000,- Penurunan PAD ini disebabkan karena :

*.Provider banyak yang mengeluhkan tentang besaran nilai pemungutan retribusi menara, yang dinilai lebih mahal dari daerah lain

Solusi yang ditempuh adalah :

*. Revisi Perbup Menara (Perbup No. 7 Tahun 2020) terutama pada poin besaran nilai retribusi menara.

B.3. Pelaksanaan APBD Dinkominfo Tahun 2022

1. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 5 program utama dengan 12 Kegiatan dan 33 sub kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar Rp. 6.628.045.678,- (Enam Milyard Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam RatusTujuh Puluh Delapan Rupiah), terdiri dari :

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah penyusunan dokumen Rencana strategis (Renstra) OPD tahun 2021 – 2026 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Alokasi anggaran Rp 6.000.000,- realisasi sebesar Rp 5.985.000,- (99,75%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp 15.000,-

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah Penyusunan Laporan LKPJ, LKJIP, LKD, dan Laporan Bulanan. Alokasi anggaran Rp 5.000.000,- realisasi sebesar Rp 5.000.000,- (100%). Realisasi Fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 0,-

1.2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan :

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan honor pejabat penatausahaan keuangan (Pengguna anggaran PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf admin). Alokasi anggaran Rp.119.500.000,- realisasi Rp.116.285.000,- (97,31%) Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Anggaran Rp. 3.215.000,-

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran Rp.3.598.515.000,- realisasi Rp.3.455.496.723,- (96,02%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Anggaran Rp. 143.118.277,-

c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pelayanan perjalanan dinas luar daerah dan dalam kota guna pelaksanaan tugas kedinasan. Alokasi anggaran Rp. 39.403.000,- realisasi Rp.39.402.708,-

(100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Anggaran Rp. 292,-

1.3.Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah melalui sub kegiatan :

- c. **Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan** aktifitasnya adalah iklan di media cetak dan media online, pencetakan baligho, pencetakan leaflet, spanduk dan biaya perjalanan dinas luar daerah study banding, alokasi anggaran Rp. 220.000.000,- realisasi Rp. 208.228.000,- realisasi fisik 100%,sisa Anggaran Rp. 11.772.000,- persentase anggaran 94,69%

1.4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Aktifitasnya adalah pembelian Lampu, kabel, batu baterai Alokasi anggaran Rp.2.645.000,- realisasi Rp.2.644.000,- (99,96%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai .Efisiensi anggaran Rp. 1000,-

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Aktifitasnya adalah belanja BBM dan Pelumas kendaraan roda 4, 5 unit roda 2, 10 unit, bahan bangunan dan konstruksi, tabung gas LPJ, Perabot kantor, sendok, garpu,piring, mangkok , tempat sampah, dan karangan bunga, handsanitizer, isi ulang galon, Bendera. Alokasi anggaran Rp.48.771.000,- realisasi Rp.44.739.150,- (99,96%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.Efisiensi Rp. 4.031.850,-

c. Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Aktifitasnya adalah Jamuan makan minum rapat, jamuan makan minum tamu kedinasan dan makan minum rapat dinas Alokasi anggaran Rp.11.571.000,- realisasi Rp.11.520.000,- (99,56%).

Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 51.000,-

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktifitasnya adalah pengadaan Laptop dan Printer untuk kedinasan. Alokasi anggaran Rp.26.150.000,- realisasi Rp.26.150.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi anggaran Rp.0,-

1.6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Aktifitasnya adalah pembelian materai untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.972.000,- realisasi Rp.972.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp.0,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Aktifitasnya adalah Pembayaran rekening telepon, PDAM dan listrik untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.46.400.000,- realisasi Rp.33.226.416,- (71,51%). Realisasi fisik 100 %. Permasalahan pelaksanaan tergantung pemakaian daya listrik, air dan telepon kantor, sehingga sisa anggaran yang ada sebagai penghematan anggaran, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Anggaran Rp. 13.173.584,-

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aktifitasnya pembelian alat dan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran Rp. 5.900.000,- Realisasi anggaran dan fisik Rp. 5.900.00,- (100%), Efisiensi Rp.0,-

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Aktifitasnya adalah untuk Pembayaran tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi dan THL. Alokasi anggaran Rp.409.050.000,-. Realisasi Rp.403.927.920,- (98,75%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 5.122.080,-

1.7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional / lapangan

Aktifitasnya adalah belanja service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan roda 4 sebanyak 5 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 10 buah, pajak kendaraan. Alokasi anggaran Rp. 100.064.000,- realisasi Rp.89.941.701,- (89.88%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.Efisiensi Rp. 10.122.299,-

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan Service AC, Komputer/ Laptop dan Printer . Alokasi anggaran Rp.10.512.000,- realisasi Rp.10.512.000,- (99,77%). Realisasi fisik 100 %. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 0,-

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan perbaikan keramik, perbaikan bocor atap, perbaikan engsel pintu alokasi anggaran Rp.14.500.000,- realisasi Rp.14.500.000,- (100%) Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 0,-

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga, yaitu melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat (terbentuknya PPID Pembantu), media dan Kemitraan Komunitas (terbentuknya KIM) Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik dengan sasaran meningkatkan implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/ RKPD/ Renja OPD/ RKA OPD/ DPA/ DPPA OPD tahun 2021. Bentuk kegiatannya meliputi :

2.1.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Aktifitasnya meliputi pencetakan Baligho, pembuatan kerangka baligho, pencetakan spanduk, Leaflet, pamflet, langganan surat kabar, iklan di media cetak, di media online, zoom meeting, live streaming, greeting Alokasi anggaran Rp.581.500.000,-

Realisasi Rp.580.149.300,- (89.88%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 1.350.700,-

Tabel Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Aktifitas	Keterangan
1	Pemeliharaan kerangka Baligho	2 unit
2	Baligho	63 buah
3	Spanduk	32 buah
4	Leaflet	5300 eks

6	Iklan advetorial	6 kali
7	Iklan socyeti	5 kali
8	Pemotretan Bupati dan Wakil Bupati	4 sesi
9	Upgreat Website Purbalingga News	1 paket
10	Surat Kabar	12 bulan
11	Greeting Media Elektronik	5 kali
12	Greeting di media lain	15 kali

b. Pelayanan Informasi Publik

Aktifitasnya tahun 2022 berupa fasilitasi kegiatan FK Metra, Bayar THL Radio, Honor Dewas dan Direktur Radio, Bayar Listrik dan PDAM dan Telpon Radio. Alokasi anggaran Rp.361.840.000,- realisasi Rp.356.032.226,- (98.39%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 5.807.774,-

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah penguatan kapasitas dengan pembentukan PPID Pembantu dan pembinaan PPID Pembantu, jumlah PPID Pembantu 29 OPD, Dinkominfo sebagai sekretaris PPID Utama. alokasi anggaran Rp. 23.991.000,- realisasi Rp.21.803.200,- (90.88%) , Fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi anggaran Rp. 2.187.800,-

d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk di Tahun 2021 jumlah 15 kelompok KIM dan 2 kali pertunjukan rakyat, 1 konten youtube, dan 1 buah film pendek. Alokasi anggaran Rp. 19.825.000,- realisasi Rp. 19.825.000,- (100%) fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 0,-

3. Program Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya mempunyai tugas perumusan konsep, dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi dan Infrastruktur TIK dan Tata kelola e-Government juga melakukan tugas perumusan ,pelaksanaan dan pemantauan , evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar data center dan TIK Pemerintah Daerah , layanan pengembangan infrastruktur internet dan penggunaan akses internet, dan juga layanan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-government

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/ RKPD/ Renja OPD/ RKA OPD/ DPA/ DPPA OPD tahun 2022. Bentuk kegiatannya meliputi :

3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

Aktifitasnya berupa belanja jasa tenaga Tim Penyusunan Jurnal, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi , Rakor Pembinaan dan Pelatihan Website. Alokasi anggaran Rp.150.080.000,- realisasi Rp.149.701.386,- (99.75%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi Rp. 378.614,-

b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Aktifitasnya berupa belanja jasa tenaga informasi teknologi Network Administrator, bandwidth internet, biaya langganan internet, langganan lisensi, langganan IP address pembelian alat jaringan (enterprise server blade), CPU , memori server dan power backup server, Alokasi anggaran Rp.1.251.775.000,- realisasi

Rp.1.251.771.718,- (99.36%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil,Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.Efisiensi Rp. 9.067.819,-

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dimaksudkan guna mengetahui sejauh mana kondisi data OPD yang diupload pada satu data Purbalingga (mengacu pada data Pusat) dan mencetak Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersinergi /bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Purbalingga.

4.1.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Aktifitasnya berupa mencetak buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA), Honor Jasa Operator Komputer. Alokasi anggaran Rp.15.420.000,- realisasi Rp.15.420.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi anggaran Rp. 0,-

b. Penyelenggaraan Otorasi Statistik Sektoral di Daerah

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/ daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan statistik sektoral, dan pembelian alat-alat komputer.Alokasi anggaran Rp. 10.971.000, (99,93%)-realisasi Rp. 10.971.00,- realisasi Fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.Efisiensi Anggaran Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah surat masuk dan keluar melalui santel dan keamanan persandian.

5.1.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a.Operasionalisasi Jaring Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota

Aktifitasnya sosialisasi persandian, honor Tim Pelaksana kegiatan, pemeliharaan alat studi dan juga komunikasi dan pemancar alat telekomunikasi , pemeliharaan Radio RIG (Radio VHF), Belanja Alat Komunikasi (Faximile Type Thermal Paper) dan belanja printer IP 4680 dan Printer LX 300, SPPD monitoring menara telekomunikasi. Sub kegiatan ini mengampu aktifitas seksi telekomunikasi yang memang tidak adanya alokasi anggaran. Adapun alokasi anggaran Rp. 48.000.000,- Realisasi Rp. 46.980.502,-. (97,88%) Realisasi fisik 100%.Permasalahan nihil.Solusi Nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Efisiensi anggaran Rp. 1.019.498,-

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun anggaran 2022, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

1. Tingkat keberhasilan Dinkominfo Tahun 2022 :

- 1.1. Terkait Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan , secara keseluruhan tingkat realisasi dan keterserapan anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menunjuk pada **skala “amat baik” yaitu rata-rata 100 %**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar **97,17%** dan Realisasi fisik kegiatan sebesar **100 %** dengan efisiensi anggaran **Rp. 212.263.973,-** (anggaran *earmark* dan *non earmark*)

- 1.2. Terkait pencapaian kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sudah dapat melebihi target – target yang sudah ditargetkan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Table 3.

Meskipun tingkat capaian kinerja Dinkominfo menunjuk pada skala amat baik namun masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan :

- 1) Tidak terserapnya anggaran tahun 2022 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
- 2) Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.
- 3) Adanya refocussing anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo
- 4) Kurangnya koordinasi dengan bidang dalam pencapaian kinerja Dinkominfo
- 5) Belum adanya personil yang mengikuti Bimtek SAKIP

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait dengan pencapaian pengelolaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :
 - 1.1. Program, kegiatan dan sub kegiatan akan dimulai/ dilaksanakan mulai awal Tahun agar sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya
 - 1.2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan Sarpras kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kelancaran kinerja pegawai
 - 1.3. Berkoordinasi dengan bidang dalam pencapaian realisasi anggaran sehingga antara realisasi anggaran dan capaian kinerja bisa seimbang
 - 1.4. Mengusulkan Bimtek dan mengikuti pegawai yang membidangi
2. Terkait dengan pencapaian kinerja sasaran
 - 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinkominfo Meningkatnya integrasi SPBE , dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dimasa yang akan datang akan melengkapi dokumen infrastruktur SPBE, yang dalam penilain di Tahun 2022 nilainya pada item infrastruktur SPBE masih sangat rendah
 - 2.2 Indikator kinerja sasaran Dinkominfo meningkatnya ketersediaan data pada Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat ,dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Purbalingga akan lebih meningkatkan ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat
 - 2.3 Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya masih tahap sosialisasi Indek KAMI, yang akan datang melaksanakan Tanda Tangan Elektronik(TTE) dan melaksanakan pemenuhan dokumen terklait keamanan Informasi untuk persiapan assesment Inek KAMI

- 2.4 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP DINKOMINFO, dalam hal ini Dinkominfo selalu berupaya untuk mengoptimalkan dalam pemenuhan laporan Akuntabilitas kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, melaksanakan evaluasi secara intern di Dinkominfo, memenuhi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi dari instansi berwenang (Inspektorat Kab. Purbalingga)

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat, dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan datang.

Purbalingga, 11 Januari 2022

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
			2.000.000,00	7.740.000,00	9.740.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	74.050.000,00	0,00	0,00	0,00	72.413.600,00	1.636.400,00
			72.413.600,00	0,00	72.413.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.240.000,00	260.000,00
			11.500.000,00	6.750.000,00	18.250.000,00		
			0,00	990.000,00	990.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	44.968.000,00	1.632.000,00
			44.968.000,00	0,00	44.968.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	81.643.623,00	856.377,00
			50.743.623,00	16.000.000,00	66.743.623,00		
			14.900.000,00	0,00	14.900.000,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.902.000,00	0,00	0,00	0,00	29.536.170,00	365.830,00
			10.021.170,00	13.200.000,00	23.221.170,00		
			5.315.000,00	1.000.000,00	6.315.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	79.285.000,00	0,00	0,00	0,00	79.229.646,00	55.354,00
			36.855.146,00	0,00	36.855.146,00		
			32.434.500,00	9.940.000,00	42.374.500,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.420.000,00	80.000,00
			39.920.000,00	0,00	39.920.000,00		
			0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.933.500,00	66.500,00
			0,00	19.975.000,00	19.975.000,00		
			808.500,00	150.000,00	958.500,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	12.532.500,00	247.500,00
			0,00	4.752.500,00	4.752.500,00		
			7.780.000,00	0,00	7.780.000,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		6.838.089.000,00	2.342.448.692,00	173.694.465,00	2.516.143.157,00	6.349.649.926,00	488.439.074,00
			1.642.243.239,00	438.715.000,00	2.080.958.239,00		
			1.388.060.547,00	364.487.983,00	1.752.548.530,00		
LKJIP DINKOMINFO 2022							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Penerimaan

- SP2D	6.535.815.868,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	2.560.364,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	10.296.540,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	55.504.158,00
- Lain-lain	0,00

Jumlah Penerimaan 6.604.176.930,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	6.365.043.326,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	2.560.364,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	10.296.540,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	55.504.158,00
- Lain-lain	170.772.542,00

Jumlah Pengeluaran 6.604.176.930,00

Saldo Kas 0,00

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Purbalingga,
Bendahara Pengeluaran

Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM
NIP. 19650519 198803 2 006

Nisa Utami, A.Md
NIP. 19861027201001213